

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
3	Profil Kantor	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2022 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra)	Bagian Keuangan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	5 Tahun
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024	Bagian Keuangan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
8	LAKIP 2023	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
9	Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2023	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Daftar Informasi Publik (DIP)	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Tahunan

11	SK PPID Pembantu	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
12	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
13	Rekapan Anggota DPRD Provinsi NTT	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2029	Cetak dan Digital	5 Tahun
14	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
15	Dokumen Laporan Tahunan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
16	Dokumen Kinerja Tahun Berjalan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Jumlah Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTT	Bagian Persidangan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKETARIAT DPRD PROVINSI NTT TAHUN 2024**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i • UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati /Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketuainya rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindunginya rahasia pribadi seseorang
2.	Daftar Nilai SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketuainya rahasia pribadi seorang PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindunginya data pribadi seorang PNS yang bersifat rahasia
3.	Dokumen penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)Pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbantunya proses penengakan hukum
4.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbantunya keberhasilan pelaksana pembangunan

5.	<p>Hasil Rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Provinsi NTT yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi NTT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i • UU No. 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga dan menjamin keharasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif
----	--	---	---	--	---

Kupang, 01 Mei 2024.

PLT. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonus Watu Raka, SE,MM

Peserta Tingkat I (VI/b)

NIP. 19710114 199903 1 006